

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA BLITAR DALAM PILKADA TAHUN 2015

Mufidatuz Zahro'in

12040254003 (PPKn, FISH, UNESA) mufidatuzz@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo dalam pemilihan kepala daerah kota Blitar tahun 2015. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang dilihat dari jenjang pendidikannya dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2015 yaitu berjumlah 37.039 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil 1% dari populasi yang ada berjumlah 370 orang dibagi dalam tiga jenjang pendidikan, diantaranya adalah SMP ke Bawah dengan sampel 205 responden, SMA 110 responden, dan Perguruan Tinggi dengan sampel 55 responden. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa angket. Berdasarkan hasil analisis data perhitungan Kruskal Wallis diperoleh signifikansi sebesar 0,00 dengan taraf kesalahan 0,05, dimana $0,00 \leq 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015 yang dibuktikan dengan hasil perolehan pada jenjang pendidikan SMP ke bawah ada yang mendapatkan kategori rendah dan pada jenjang SMA/Sederajat tidak ada yang mendapatkan kategori Rendah, sedangkan Perguruan Tinggi tidak ada yang mendapatkan kategori Rendah dan Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga partisipasinya.

Kata Kunci: tingkat pendidikan, partisipasi, Pilkada tahun 2015.

Abstract

The research was carried out because of researchers want to know if there are the relationship between the level of education with a public participation in sukorejo in local election Blitar city in 2015. The research uses descriptive quantitative methods. The population of the research in the Sukorejo Blitar city viewed from education level and registered as voters in 2015 the general election year were 37.039 people, while included in this study taken 1 % of the population is were 370 the divided into three education, including junior down with 205 respondents sample, 110 respondents high school, and college with 55 respondents sample. This research using data collection method of the survey. According to the analysis of data calculation kruskal wallis obtained significance of 0,00 with standard 0,05 mistake, where $0,00 \leq 0,05$ means h_0 turned down and h_a accepted . This shows there was a correlation between the level of education with their level of participation blitar city in the election the year 2015 as evidenced by revenue at the level of junior high school down there are those who get the category of low and high school at the level or the equivalent level there is no one to get low category , while college there is no one to get low category and was. This indicates that the higher the level of public education the higher also her active participation .

Keywords: levels of education , participation , election in 2015.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilu merupakan alat untuk mencapai cita-cita demokrasi, yakni adanya keterwakilan masyarakat dalam sistem pemerintahan yang dilakukan secara legal berdasarkan Undang-undang. Dalam Negara yang demokratis, maka semua suksesi dilakukan melalui Pemilu. Demikian yang terjadi di Indonesia.

Tahun 2015 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Jawa Timur. Isu pertama dalam pemilihan umum di Indonesia terkait dengan partisipasi politik yang mengalami naik turun. Maksud dari partisipasi politik

adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu warga Negara untuk memengaruhi pilihan orang untuk posisi pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah. Partisipasi dalam arti yang sederhana adalah ikut pemilu (*voter turnout*) dan ikut serta dalam kampanye-kampanye pemilu, aksi damai maupun aksi dengan menggunakan kekerasan.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (*partisipasi*) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga Negara maka warga masyarakat berhak

ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Menurut Mc. Closky (dalam Budiarjo 2008:368), partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau seponatan, mantap atau sporadi, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.

Blitar merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur yang juga melaksanakan Pilkada tahun 2015. Blitar hanya memiliki satu kandidat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang dalam lingkup Kabupaten. Sedangkan dalam lingkup kota, Blitar memiliki dua calon Pilwali yaitu Muh Samanhudin Anwar dengan pasangannya Santoso dan lawannya yaitu Mochsin dengan pasangannya Dwi Sumardianto. Muh. Samanhudin merupakan petahan walikota Blitar yang kembali mendaftarkan diri sebagai calon walikota Blitar untuk periode lima tahun mendatang bersama pasangannya calon wakil walikota Santoso.

KPU gencar melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada semua kelompok sasaran, tidak hanya pada para tokoh, melainkan juga ke pemilih langsung. Tidak hanya KPU yang mensosialisasikan pada masyarakat tetapi pasangan calon juga aktif kampanye tentang mekanisme pemilihan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. KPU kota Blitar dalam mensosialisasikan pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 melalui media massa pamflet, radio, TV lokal dan kampanye-kampanye yang diselenggarakan bersama warga kota Blitar, seperti nonton bareng sepak bola bersama warga masyarakat kota Blitar, sosialisasi bersama warga di Taman Kota Kebonrojo Bitar dan juga mensosialisasikan untuk pemilih pemula melalui sekolah-sekolah yang ada di kota Blitar.

Kota Blitar mempunyai tiga Kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Sanan Wetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Pilwali yang dilaksanakan di kota Blitar diikuti dengan dua pasangan calon yaitu Muh Samanhudin dengan pasangannya Santoso dan lawannya Mochsin dengan pasangannya Dwi Sumardianto.

Kecamatan yang berada di wilayah pusat kota Blitar adalah Kecamatan Sukorejo. Kecamatan Sukorejo merupakan Kecamatan yang memiliki luas tanah terkecil namun penduduknya paling padat (menurut Badan Statistik Kota Blitar). Jumlah penduduk Kecamatan Sukorejo kota Blitar secara keseluruhan berjumlah 52.268 jiwa, sedangkan yang memiliki hak pilih dalam pilkada tahun 2015 adalah berjumlah 37.039 jiwa. Perolehan suara dari Kecamatan Sukorejo dalam Pilkada tahun 2015 kemarin adalah sekitar 26.675 jiwa sehingga mencapai 72%, sedangkan yang golput sekitar 10.521 jiwa. Dilihat dari persentase tersebut, tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Sukorejo tergolong cukup tinggi (sumber: Dinas Kecamatan Sukorejo kota Blitar).

Kecamatan Sukorejo yang bertepatan di wilayah pusat perkotaan banyak sekali mendapatkan informasi-informasi tentang Pilkada. Dengan banyaknya informasi yang didapat oleh masyarakat akan mempermudah masyarakat Sukorejo untuk mengetahui latar belakang dari calon-calon yang akan dipilih maupun pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tersebut secara merata. Namun dalam perkembangannya, masyarakat mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, selama masyarakat tersebut berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, karena seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan memengaruhi kesadaran politik seseorang tersebut. Seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya salah satunya dengan melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki seseorang karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Salah satu lingkungan pendidikan yang hampir dipilih oleh semua orang adalah pendidikan formal. Sesuai dengan data bulan Desember 2015, Masyarakat Kecamatan Sukorejo yang lulus pendidikan formal berjumlah 45.076 jiwa, sedangkan yang tidak berpendidikan baik itu masih bayi maupun tidak lulus sekolah berjumlah 7.192 jiwa. Apabila dilihat dari persentase adalah sebagai berikut.



Diagram 1
persentase masyarakat yang sekolah dan tidak sekolah
Sumber: Dinas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Dilihat dari diagram 1, masyarakat yang sekolah adalah 86% sedangkan yang tidak sekolah adalah 14%. Berikut ini adalah spesifikasi dari tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sukorejo mulai dari sekolah menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas adalah.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan masyarakat Kecamatan Sukorejo kota Blitar (data bulan Desember 2015)

Tingkat pendidikan	Jumlah	%
Sekolah menengah ke bawah (SD / MI dan SMP / MTs)	25.058 Orang	55.60 %
Sekolah menengah (SMA, SMK, maupun MA)	13.263 Orang	29.42 %
Sekolah menengah ke atas (Perguruan Tinggi)	6.705 Orang	14.88 %
Jumlah	45.076 orang	100 %

Sumber: Dinas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kota Blitar khususnya Kecamatan Sukorejo tidak termasuk rendah, karena dilihat dari persentase masyarakat yang sekolah dan yang tidak sekolah menunjukkan lebih dari 75% masyarakat sudah menempuh pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan semakin dituntut untuk dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, yang dapat mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dalam usaha menyesuaikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan juga sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang politik. Karena tanpa pendidikan seseorang tidak akan memahami apa arti penting dari berpolitik dan memilih calon yang telah dipilih tersebut. Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor determinan dalam partisipasi dalam pilkada, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Blitar dalam Pilkada th 2015” dilakukan karena melihat kondisi masyarakat kota Blitar yang mana tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sukorejo tidak termasuk rendah dan banyak mendapatkan informasi tentang pilkada melalui kampanye-kampanye maupun media massa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukorejo karena kecamatan ini berada dipusat wilayah perkotaan. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sukorejo kota Blitar tidak termasuk rendah dan tingkat

partisipasinya juga cukup tinggi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Blitar dalam Pilkada th 2015 yang dilakukan di salah satu Kecamatan yang berada di kota Blitar yaitu Kecamatan Sukorejo.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo dalam pemilihan kepala daerah kota Blitar tahun 2015.

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi penyiapan anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Bahkan gejala proses pendidikan ini sudah ada sejak manusia ada, meskipun proses pelaksanaannya masih sangat sederhana. Namun hal ini merupakan fenomena bahwa proses pendidikan sejak dahulu kala sudah ada. Karena begitu sederhananya proses pendidikan pada zaman dahulu kala itu maka dirasa orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah proses pendidikan.

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Bila seseorang memiliki pengertian (*understansing*) atau sikap (*attitude*) tertentu, yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman sendiri, maka oleh banyak orang dianggap yang bersangkutan tahu atau berpengetahuan. Begitu juga bila seseorang memiliki keterampilan atau ketangkasan (*aptitude*) yang diperolehnya dari latihan dan praktek, maka kemampuan tersebut disebut kebiasaan atau kecukupan. Namun kecukupan atau kebiasaan ini, sekalipun karena keterbiasaan melakukan sesuatu, juga karena yang bersangkutan sebelumnya tahu bagaimana mengerjakannya, karena pada prinsipnya tahu itu adalah tahu mengerjakan (*know to do*), tahu bagaimana (*know how*) dan tahu mengapa (*know why*) sesuatu itu.

Menurut Syafii (2002:132) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Jadi Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif, dapat pula bersifat pasif. Dikatakan partisipasi aktif bila orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam suatu organisasi politik, member dukungan keuangan, atau membayar iuran keanggotaan. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi pasif. Dalam

proses, orang bisa beralih dari partisipasi aktif ke partisipasi pasif. Yang penting ialah komitmen mereka untuk membangun organisasi politik mereka secara tanggung jawab. Dengan demikian eksistensi organisasi politik yang bersangkutan mempunyai arti baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi anggotanya.

Bentuk partisipasi yang lain ialah mengikuti suatu rapat umum demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau oleh kelompok-kelompok berkepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini bisa bersifat sepihak, tetapi sering kali karena diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing. Dalam kasus seperti ini, orang pada dasarnya berpartisipasi bukan berdasarkan kesadarannya sendiri, melainkan karena dimobilisasi. Namun kegiatan-kegiatan semacam ini berlangsung hanya sebentar.

Bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya ialah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara. Kegiatan ini dilakukan pada saat diperlukan. Untuk mengikuti kegiatan ini yang diperlukan hanya sedikit inisiatif. Disamping itu ada pula orang-orang yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Mereka ini disebut orang-orang yang apatis terhadap politik. Selain itu ada pula orang-orang yang teralienasi dari sistem politik yang ada, lantas ada pula pelaku-pelaku kekerasan politik. Akibat dari alienasi bisa berupa apatis politik atau bisa juga berupa partisipasi pada berbagai level politik. Kekerasan itu bisa berbentuk demonstrasi, kerusuhan, bisa juga berbentuk aksi-aksi terror serta pembunuhan politik. Celakanya ada pula orang dan kelompok yang menganggap kekerasan sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya merupakan kondisi mutlak yang harus terjadi. Partisipasi masyarakat dapat menggambarkan sukses atau tidaknya pilkada. Partisipasi merupakan salah satu bentuk dari pengetahuan (melek) politik masyarakat, yakni ketika secara langsung maupun tidak langsung mengambil peran dalam perjalanan suatu bangsa atau Negara. Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat sebelum dilaksanakannya Pilkada, pada saat dilaksanakannya Pilkada dan sesudah dilaksanakan Pilkada.

Konsep M.L. Goel berasumsi bahwa partisipasi politik masyarakat dapat ditinjau dari partisipasi politik individual, kemudian dari konsep tersebut, partisipasi politik dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe partisipasi politik menurut konsep Paige yaitu aktif, apatis, militant radikal dan pasif.

Tipe-tipe partisipasi politik masyarakat dapat diukur dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu seperti, *Apathetic anactives*, *Passive supporters*, *Contact specialist*, *Communicators*, *Party and campaign workers*, *Community activists*, *Protesters*. Jika individu-individu melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai partisipatif, maka partisipasi politik masyarakat dikategorikan sebagai partisipasi aktif, dan jika kegiatan yang dilakukan individu lebih kearah negatif atau tidak peduli terhadap politik, maka partisipasi masyarakat tergolong apatis. Partisipasi masyarakat akan menjadi militant radikal jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah diwarnai dengan tindak kekerasan, sedangkan partisipasi akan berubah menjadi pasif, jika tindakan-tindakan individu tidak didasari oleh pengetahuan dan hanya terbatas pada kegiatan menaati aturan-aturan pemerintah.

Berarti dalam partisipasi agar mendapatkan tingkat partisipasi yang tinggi juga memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang luas salah satunya adalah melalui pendidikan, dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan banyak pengetahuan sehingga partisipasi politik masyarakat akan berubah menjadi aktif. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul "Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Blitar dalam Pilkada Tahun 2015" adalah apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka pengetahuan seseorang akan semakin tinggi dan tingkat kesadaran politik juga tinggi yang di implementasikan melalui partisipasi dalam politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dan diharapkan akan dapat mengambil suatu gambaran dalam penelitian tersebut. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 dilihat dari tingkat pendidikan.

Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang terdaftar sebagai pemilih atau yang mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya. Namun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang sudah memiliki hak pilih yaitu berjumlah 37.039 jiwa.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:174). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengambilan sampel berstrata (*Stratified Random Sampling*). Dimana penulis dapat menentukan jumlah sampel per-strata dalam standar minimal pengambilan sampel, adapun yang menjadi lapisan (*stratum*) nya adalah tingkat pendidikan yang meliputi: tingkat menengah ke bawah (SD/SMP sederajat), tingkat menengah (SMA sederajat), tingkat menengah ke atas (PT). Kemudian dari masing-masing stratum akan diambil sampel secara acak sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel stratified random sampling hasil 1% dari masyarakat yang memiliki hak pilih yaitu 370 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2
Sampel Penelitian

Tingkat Pendidikan	Jumlah Lulusan	Jumlah DPT	Jumlah Sampel
Sekolah menengah ke bawah (SD/MI dan SMP/MTs)	25.058 orang	20.548 orang	205 orang
Sekolah menengah (SMA / Sederajat)	13.263 orang	10.993 orang	110 orang
Sekolah menengah ke atas (Perguruan Tinggi)	6.705 orang	5.498 orang	55 orang
Jumlah	45.076 orang	37.039 orang	370 orang

Sumber: Dinas Kecamatan Sukorejo Kota Blita

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan angket. Dokumentasi artinya mengumpulkan data dengan cara mencatat ulang atau mendokumentasikan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain atau suatu badan, misalnya: dinas-dinas pemerintah, badan pusat statistik, dsb.

Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah tidak perlu mengumpulkan sendiri data untuk menggambarkan kondisi populasinya. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka, yaitu salah satu jenis angket dimana item pernyataan pada angket juga disertai beberapa kemungkinan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dinilainya telah dilakukan. Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan tingkat pendidikan terhadap pengetahuan politik masyarakat kota Blitar tentang Pilkada tahun 2015 yang dilakukan di kecamatan Sukorejo.

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194). Dalam kaitannya dengan pembuatan atau penyusunan instrumen, maka pembuatannya harus didasarkan pada variabel yang akan diukur. Variabel tersebut adalah partisipasi politik yang dibagi menjadi tiga sub variabel diantaranya adalah partisipasi masyarakat sebelum dilaksanakan pilkada, pada saat dilaksanakan pilkada, dan sesudah dilaksanakan pilkada.

Teknik analisis data menggunakan persentase dan uji Kruskal Wallis. Penggunaan teknik persentase guna untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Sukorejo apabila dilihat dari segi kelulusan sekolah, baik itu sekolah menengah ke bawah (SD, SMP/Sederajat), menengah (SMA/Sederajat), dan menengah ke atas (Perguruan tinggi), sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dari penelitian ini yaitu Uji Kruskal Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kelompok data sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Warga Yang Memiliki Tingkat Pendidikan SMP Ke Bawah.

Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMP ke bawah berdasarkan skor pernyataan dari tiap individu adalah.

Tabel 3

Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Skor Penilaian.

Pend.	Kategori				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
SMP ke Bawah	-	3 responden (1%)	105 responden (52%)	92 responden (45%)	5 responden (2%)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara individu berdasarkan skor penilaian dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. SMP ke bawah dengan jumlah sampel 205 responden dengan perolehan 3 responden mendapatkan kategori rendah dengan perolehan persentase 1%, 105 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 52%, 92 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 45%, dan 5 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 2%.

Penelitian ini terdapat tiga sub variabel, yaitu sebelum dilaksanakan pilkada, pada saat dilaksanakan pilkada, dan sesudah dilaksanakan pilkada, hasilnya adalah.

Tabel 4
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMP ke Bawah Sebelum di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
1	Mencari informasi tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	33	16 %	172	84 %	33
2	Mencari informasi lanjutan tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	20	9 %	185	91 %	20
3	Terdorong aktif dalam kegiatan pilkada	30	15 %	175	85 %	30
4	Mengetahui dengan jelas calon-calon wali kota Blitar	152	74 %	53	26 %	152
5	Memberikan informasi tentang pilkada	97	47 %	108	53 %	97
6	Mengikuti pendidikan politik baik dari partai atau KPU	37	18 %	168	82 %	37
7	Mengikuti sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, Rt, Rw, dan Kelurahan	38	19 %	167	81 %	38
8	Menghadiri sosialisasi dari para calon walikota Blitar	128	62 %	77	38 %	128
9	Mengikuti berita tentang pilkada	51	25 %	154	75 %	51
10	Mengikuti kampanye	123	60 %	82	40 %	123
Jumlah		709	-	1341	-	709
Rata-rata		71	-	134	-	71 (35 %)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMP ke bawah dengan sub variabel partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 71 responden menyatakan Ya dan 134 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh

rata-rata skor sebanyak 71 dengan hasil persentase 35% sehingga dikategorikan tidak berperan / rendah. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya rendah.

Tabel 5
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMP ke Bawah Pada Saat di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Soal				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
11	Menggunakan hak pilih dalam Pilkada tahun 2015	185	91 %	20	9 %	185
12	Menggunakan hak pilih berdasarkan kesadaran diri sendiri	152	74 %	53	26 %	152
13	Tidak pernah mendapatkan imbalan pada saat memberikan hak suara	138	67 %	67	33 %	138
14	Pilkada bebas dari politik uang	156	76 %	49	24 %	156
15	Menginginkan calon yang tidak memberi uang	166	81 %	39	19 %	166
16	Memilih calon yang tidak banyak mengobral janji.	202	98 %	3	2 %	202
17	Tetap memberikan hak pilih saat tidak ada imbalan	143	70 %	62	30 %	143
18	Mengutamakan hak pilih daripada pekerjaan yang lain	143	70 %	62	30 %	143
19	Rela tidak bekerja pada saat berlangsungnya pilkada	149	73 %	56	27 %	149
20	Menggunakan hak pilih tanpa pengaruh dari orang lain	183	89 %	22	11 %	183
Jumlah		1617	-	433	-	1617
Rata-rata		161	-	44	-	161 (79%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMP ke bawah dengan sub variabel partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 161 responden menyatakan Ya dan 44

responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor sebanyak 161 dengan hasil persentase 79% sehingga dikategorikan berperan / tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya tinggi.

Tabel 6
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMP ke Bawah Sesudah di laksanakan Pilkada.

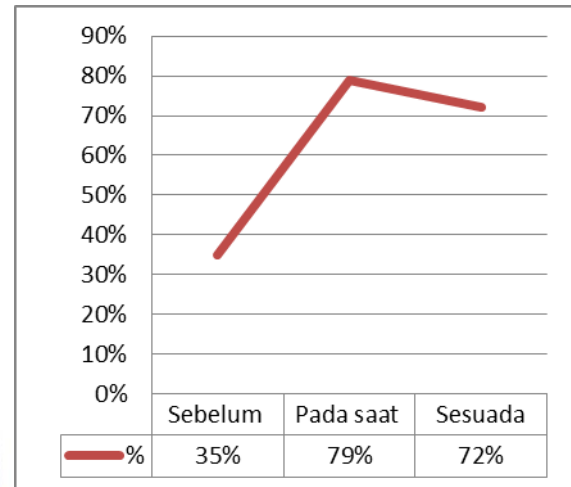
No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
21	Hadir di TPS pada saat penghitungan hak suara	58	28%	147	72 %	58
22	Tidak membuat gaduh ketika berlangsungnya penghitungan suara	182	89%	23	11 %	182
23	Menerima dengan baik calon yang menang	172	84%	33	16 %	172
24	Tidak melakukan kekacauan	168	82%	37	18 %	168
25	Melapor pada KPU jika melihat adanya kecurangan	162	79%	43	21 %	162
Jumlah		742	-	283	-	742
Rata-rata		148	-	57	-	148 (72%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMP ke bawah dengan sub variabel partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 148 responden menyatakan Ya dan 57 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor sebanyak 148 dengan hasil persentase 72% sehingga dikategorikan berperan / tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya tinggi.

Dari hasil ketiga sub variabel diatas diperoleh perbedaan tingkat partisipasi antara sebelum dilaksanakannya pilkada sampai sesudah dilaksanakannya pilkada. Perbedaannya adalah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan SMP ke Bawah berdasarkan sub variabel yang pertama sebelum dilaksanakannya pilkada diperoleh 35%, artinya sebelum dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasi masyarakat rendah. Sub variabel yang ke dua

adalah pada saat dilaksanakannya pilkada diperoleh 79%, artinya pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Dan sub variabel yang ke tiga adalah sesudah dilaksanakannya pilkada diperoleh 72%, artinya sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Apabila digambarkan dalam diagram line adalah sebagai berikut.



Line 1
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMP ke Bawah

Sumber: Data Primer

Dari diagram line 1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMP ke Bawah sebelum dilaksanakan pilkada 35%, pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya melesit naik menjadi 79%, dan sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya kembali turun menjadi 72%.

Data Partisipasi Warga Yang Memiliki Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat.

Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat berdasarkan skor pernyataan dari tiap individu adalah.

Tabel 7
Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Skor Penilaian.

Pend.	Kategori				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
SMA/Sederajat	-	-	33 responden (30%)	70 responden (64%)	7 responden (6%)

Sumber: Data Primer

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara individu berdasarkan skor penilaian antara tingkat sekolah menengah ke bawah (smp ke bawah), menengah (sma/ sederajat), dan menengah ke atas (perguruan tinggi) dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat

tinggi. SMA/Sederajat dengan sampel berjumlah 110 responden dengan perolehan 33 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 30%, 70 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 64%, dan 7 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 6%.

Penelitian ini terdapat tiga sub variabel, yaitu sebelum dilaksanakan pilkada, pada saat dilaksanakan pilkada, dan sesudah dilaksanakan pilkada, hasilnya adalah.

Tabel 8
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMA/Sederajat Sebelum di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
1	Mencari informasi tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	47	43%	63	57%	47
2	Mencari informasi lanjutan tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	47	43%	63	57%	47
3	Terorong aktif dalam kegiatan pilkada	64	58%	46	42%	64
4	Mengetahui dengan jelas calon-calon wali kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015	72	65%	38	35%	72
5	Memberikan informasi tentang pilkada.	57	52%	53	48%	57
6	Mengikuti pendidikan politik baik dari partai atau KPU.	58	53%	52	47%	58
7	Mengikuti sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, Rt, Rw, dan Kelurahan	90	82%	20	18%	90
8	Menghadiri sosialisasi dari para calon walikota Blitar	74	67%	36	33%	74
9	Mengikuti berita tentang pilkada	81	74%	29	26%	81
10	Mengikuti kampanye	68	62%	42	38%	68
Jumlah		658	-	442	-	658
Rata-rata		66	-	44	-	66 (60%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat dengan sub variabel partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 66 responden menyatakan Ya dan 44 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 66 dengan hasil persentase 60% sehingga

dikategorikan Cukup berperan / Sedang. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya sedang.

Tabel 9
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMA/Sederajat Pada saat di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
11	Menggunakan hak pilih dalam Pilkada tahun 2015	91	83%	19	17%	91
12	Menggunakan hak pilih berdasarkan kesadaran diri sendiri	91	83%	19	17%	91
13	Tidak pernah mendapatkan imbalan pada saat memberikan hak suara	91	83%	19	17%	91
14	Pilkada bebas dari politik uang	81	74%	29	26%	81
15	Menginginkan calon yang tidak memberi uang.	90	82%	20	18%	90
16	Memilih calon yang tidak banyak mengobral janji	80	73%	30	27%	80
17	Tetap memberikan hak pilih saat tidak ada imbalan	85	77%	25	23%	85
18	Mengutamakan hak pilih daripada pekerjaan yang lain	82	75%	28	25%	82
19	Rela tidak bekerja pada saat berlangsungnya pilkada	79	72%	32	28%	79
20	Menggunakan hak pilih tanpa pengaruh dari orang lain	76	69%	34	31%	76
Jumlah		846	-	255	-	846
Rata-rata		85	-	25	-	85 (77%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat dengan sub variabel partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 85 responden menyatakan Ya dan 25 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 85 dengan hasil persentase 77% sehingga dikategorikan berperan / tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya tinggi.

Tabel 10
Partisipasi Masyarakat Lulusan SMA/Sederajat Sesudah di laksanakan Pilkada.

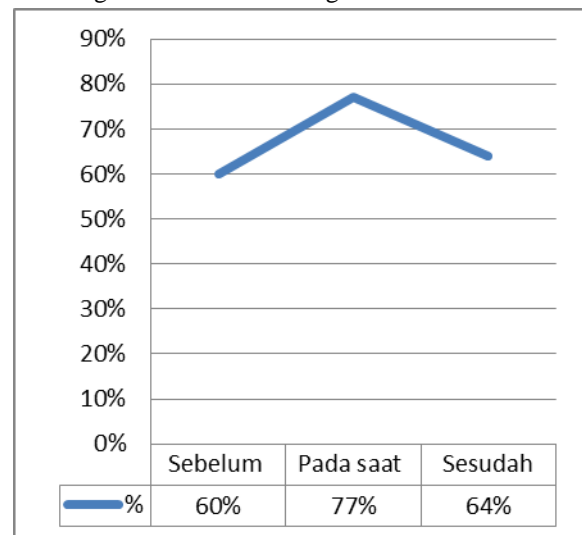
No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
21	Hadir di TPS pada saat penghitungan hak suara	78	71%	32	29 %	78
22	Tidak membuat gaduh ketika berlangsungnya penghitungan suara	67	61%	43	39 %	67
23	Menerima dengan baik calon yang menang	69	63%	41	37 %	69
24	Tidak melakukan kekacauan	76	69%	34	31 %	76
25	Melapor pada KPU jika melihat adanya kecurangan	62	56%	48	44 %	62
Jumlah		352	-	198	-	352
Rata-rata		70	-	40	-	70 (64%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat dengan sub variabel partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 70 responden menyatakan Ya dan 40 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 70 dengan hasil persentase 64% sehingga dikategorikan berperan / tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya tinggi.

Dari hasil ketiga sub variabel diatas diperoleh perbedaan tingkat partisipasi antara sebelum dilaksanakannya pilkada sampai sesudah dilaksanakannya pilkada. Perbedaannya adalah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan SMA/Sederajat berdasarkan sub variabel yang pertama sebelum dilaksanakannya pilkada diperoleh 60%, artinya sebelum dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasi masyarakat sedang. Sub variabel yang ke dua adalah pada saat dilaksanakannya pilkada diperoleh 77%, artinya pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Dan sub variabel yang ke tiga adalah sesudah dilaksanakannya pilkada diperoleh 64%, artinya sesudah dilaksanakan pilkada tingkat

partisipasi masyarakat tinggi. Apabila digambarkan dalam diagram line adalah sebagai berikut.



Line 2

Tingkat Partisipasi Masyarakat Lulusan SMA / Sederajat

Sumber: Data Primer

Dari diagram line 2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMA / Sederajat sebelum dilaksanakan pilkada 60%, pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya naik menjadi 77%, dan sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya kembali turun menjadi 64%.

Data Partisipasi Warga Yang Memiliki Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi.

Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan Perguruan Tinggi berdasarkan skor pernyataan dari tiap individu adalah.

Tabel 11
Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Skor Penilaian.

Pend.	Kategori				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
SMA/Sederajat	-	-	-	19 responden (35%)	36 responden (6%)

Sumber: Data Primer.

Penelitian ini terdapat tiga sub variabel, yaitu sebelum dilaksanakan pilkada, pada saat dilaksanakan pilkada, dan sesudah dilaksanakan pilkada, hasilnya adalah.

Tabel 12
Partisipasi Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi Sebelum di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
1	Mencari informasi tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	47	43 %	63	57 %	47
2	Mencari informasi lanjutan tentang pilkada kota Blitar tahun 2015	47	43 %	63	57 %	47
3	Terdorong aktif dalam kegiatan pilkada	64	58 %	46	42 %	64
4	Mengetahui dengan jelas calon-calon wali kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015	72	65 %	38	35 %	72
5	Memberikan informasi tentang pilkada.	57	52 %	53	48 %	57
6	Mengikuti pendidikan politik baik dari partai atau KPU.	58	53 %	52	47 %	58
7	Mengikuti sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, Rt, Rw, dan Kelurahan	90	82 %	20	18 %	90
8	Menghadiri sosialisasi dari para calon walikota Blitar	74	67 %	36	33 %	74
9	Mengikuti berita tentang pilkada	81	74 %	29	26 %	81
10	Mengikuti kampanye	68	62 %	42	38 %	68
Jumlah		658	-	442	-	658
Rata-rata		66	-	44	-	66 (60%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan Perguruan Tinggi dengan sub variabel partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 41 responden menyatakan Ya dan 14 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 41 dengan hasil persentase 75% sehingga dikategorikan Berperan/Tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sebelum di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya tinggi.

Tabel 13
Partisipasi Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi Pada Saat di laksanakan Pilkada.

No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
11	Menggunakan hak pilih dalam Pilkada tahun 2015	54	98%	1	2 %	54
12	Menggunakan hak pilih berdasarkan kesadaran diri sendiri	55	100 %	0	0 %	55
13	Tidak pernah mendapatkan imbalan pada saat memberikan hak suara	53	96%	2	4 %	53
14	Pilkada bebas dari politik uang	55	100 %	0	0 %	55
15	Menginginkan calon yang tidak memberi uang	55	100 %	0	0 %	55
16	Memilih calon yang tidak banyak mengobral janji	55	100 %	0	0 %	55
17	Tetap memberikan hak pilih saat tidak ada imbalan	55	100 %	0	0 %	55
18	Mengutamakan hak pilih dari pekerjaan yang lain	51	93%	4	7 %	51
19	Rela tidak bekerja pada saat berlangsungnya pilkada	41	75%	14	25 %	41
20	Menggunakan hak pilih tanpa pengaruh dari orang lain	51	93%	4	7 %	51
Jumlah		525	-	25	-	525
Rata-rata		53	-	3	-	53 (96%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015)

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan Perguruan Tinggi dengan sub variabel partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 53 responden menyatakan Ya dan 3 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 53 dengan hasil persentase 96% sehingga dikategorikan Sangat berperan / Sangat tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat pada saat di laksanakan pilkada tahun 2015 di

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya sangat tinggi.

Tabel 14
Partisipasi Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi Sesudah di laksanakan Pilkada.

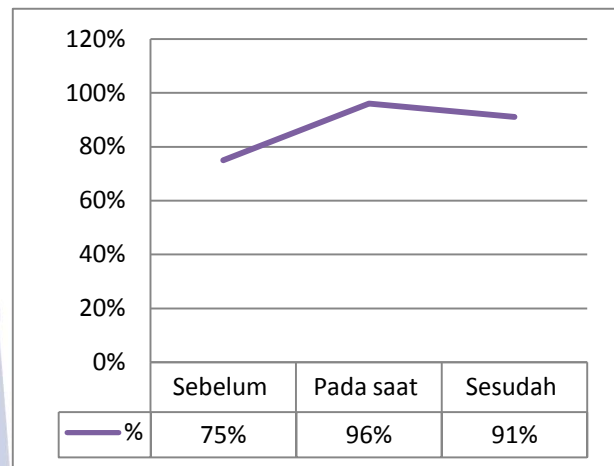
No	Indikator	Jawaban Responden				Skor
		Ya	%	Tidak	%	
21	Hadir di TPS pada saat penghitungan hak suara	38	69 %	17	31 %	38
22	Tidak membuat gaduh ketika berlangsungnya penghitungan suara	53	96 %	2	4 %	53
23	Menerima dengan baik calon yang menang	51	93 %	4	7 %	51
24	Tidak melakukan kekacauan	53	96 %	2	4 %	53
25	Melapor pada KPU jika melihat adanya kecurangan	53	96 %	2	4 %	53
Jumlah		248	-	27	-	248
Rata-rata		50	-	5	-	50 (91%)

Sumber: (Di olah dari data primer penelitian di lapangan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015).

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015 yang memiliki pendidikan Perguruan Tinggi dengan sub variabel partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada diperoleh rata-rata sebanyak 50 responden menyatakan Ya dan 5 responden menyatakan Tidak, maka dari itu diperoleh skor 50 dengan hasil persentase 91% sehingga dikategorikan Sangat berperan/Sangat tinggi. Artinya rata-rata dari sub variabel tentang partisipasi masyarakat sesudah di laksanakan pilkada tahun 2015 di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dikategorikan partisipasinya sangat tinggi.

Dari hasil ketiga sub variabel diatas diperoleh perbedaan tingkat partisipasi antara sebelum dilaksanakannya pilkada sampai sesudah dilaksanakannya pilkada. Perbedaannya adalah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan SMP ke Bawah berdasarkan sub variabel yang pertama sebelum dilaksanakannya pilkada diperoleh 75%, artinya sebelum dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Sub variabel yang ke dua adalah pada saat dilaksanakannya pilkada diperoleh 96%, artinya pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat

partisipasi masyarakat sangat tinggi. Dan sub variabel yang ke tiga adalah sesudah dilaksanakannya pilkada diperoleh 91%, artinya sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Apabila digambarkan dalam diagram line adalah sebagai berikut.



Line 3

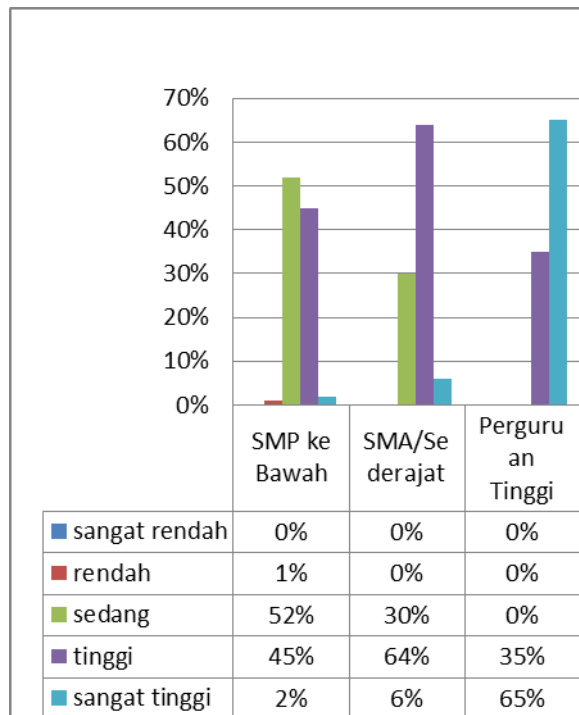
Partisipasi Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi

Sumber: Data Primer

Dari diagram line 3 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan Perguruan Tinggi sebelum dilaksanakan pilkada 75%, pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya naik menjadi 96%, dan sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya kembali turun menjadi 91%.

Perbedaan Data Berdasarkan Skor Penilaian.

Tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan pernyataan tiap individu diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara individu berdasarkan skor penilaian antara tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan skor penilaian antara tingkat sekolah menengah ke bawah (smp ke bawah), menengah (sma/ sederajat), dan menengah ke atas (perguruan tinggi) dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. SMP ke bawah dengan jumlah sampel 205 responden dengan perolehan 3 responden mendapatkan kategori rendah dengan perolehan persentase 1%, 105 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 52%, 92 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 45%, dan 5 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 2%. SMA/ Sederajat dengan sampel berjumlah 110 responden dengan perolehan 33 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 30%, 70 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 64%, dan 7 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 6%. Sedangkan Perguruan Tinggi dengan sampel berjumlah 55 responden dengan diperoleh 19 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 35%, dan 36 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 65%. Apabila digambarkan dalam colum adalah sebagai berikut.



Bagan 1
Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Skor Penilaian dilihat dari Jenjang Pendidikan

Sumber: Data Primer

Dari bagan 1 dapat kita lihat bahwa perbedaan partisipasi masyarakat secara individu dilihat dari jenjang pendidikan antar sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), Sekolah menengah (SMA/Sederajat), dan Sekolah menengah ke atas (Perguruan Tinggi) adalah semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi dalam pilkada tahun 2015.

Perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sub Variabel Antara Antar Jenjang Pendidikan

Partisipasi Masyarakat Sebelum dilaksanakannya Pilkada.

Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang sesuai dengan sub variabel partisipasi Masyarakat Sebelum dilaksanakannya Pilkada antara tingkat sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), menengah (SMA/ sederajat), dan menengah ke atas (Perguruan Tinggi) adalah.

Tabel 15

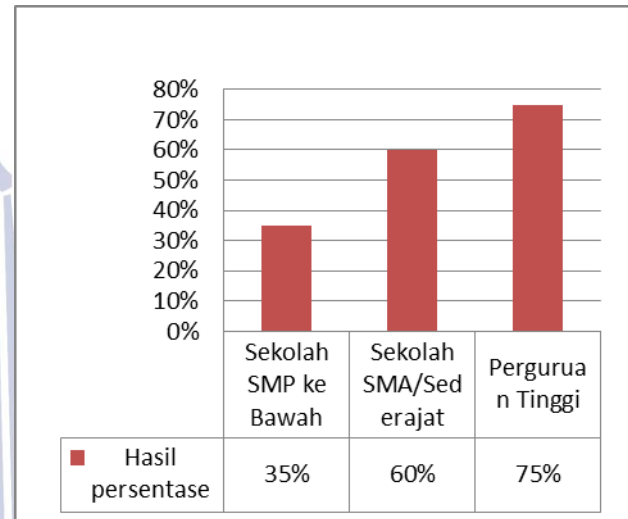
Perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Sebelum dilaksanakannya Pilkada

Pendidikan	Skor	Persentase
SMP ke Bawah	71	35%
SMA / Sederajat	66	60%
Perguruan Tinggi	41	75%

Sumber: Data Primer

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMP ke Bawah dengan

Sampel 205 responden diperoleh hasil rata-rata Skor sebesar 71 dengan hasil persentase 35%. Tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMA / Sederajat dengan Sampel 110 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 66 dengan hasil persentase 60%. Dan Tingkat partisipasi masyarakat lulusan Perguruan Tinggi dengan Sampel 55 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 41 dengan hasil persentase 75%. Apabila digambarkan dalam colum adalah sebagai berikut.



Bagan 2
Partisipasi Masyarakat Sebelum dilaksanakannya Pilkada
Sumber: Data Primer

Dari bagan 2 dapat dilihat bahwa ada perbedaan partisipasi masyarakat sebelum dilaksanakannya pilkada tahun 2015 antara sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), sekolah menengah (SMA/Sederajat), dan sekolah menengah ke atas (PT). SMP ke Bawah dengan hasil persentase 35% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya rendah, SMA/Sederajat dengan hasil persentase 60% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya sedang, dan Perguruan Tinggi dengan hasil persentase 75% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya tinggi.

Partisipasi Masyarakat Pada Saat dilaksanakannya Pilkada.

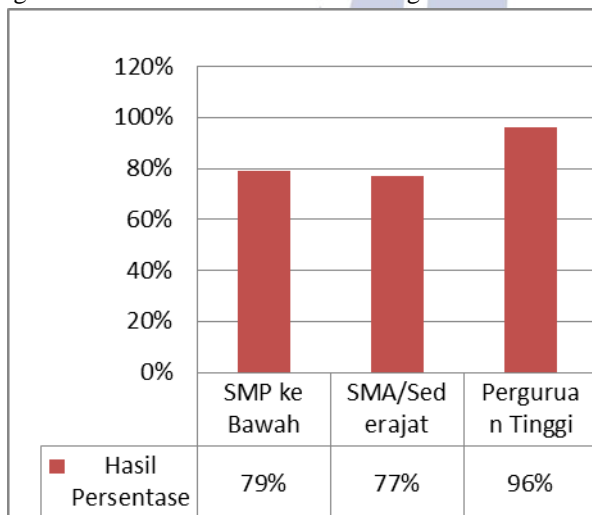
Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang sesuai dengan sub variabel partisipasi Masyarakat Pada Saat dilaksanakannya Pilkada antara tingkat sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), menengah (SMA/ sederajat), dan menengah ke atas (Perguruan Tinggi) adalah.

Tabel 16
Perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Saat dilaksanakan Pilkada

Pendidikan	Skor	Persentase
SMP ke Bawah	161	79%
SMA / Sederajat	85	77%
Perguruan Tinggi	53	96%

Sumber: Data Primer

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMP ke Bawah dengan Sampel 205 responden diperoleh hasil rata-rata Skor sebesar 161 dengan hasil prosentase 79%. Tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMA / Sederajat dengan Sampel 110 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 85 dengan hasil prosentase 77%. Dan Tingkat partisipasi masyarakat lulusan Perguruan Tinggi dengan Sampel 55 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 41 dengan hasil prosentase 96%. Apabila digambarkan dalam colum adalah sebagai berikut.



Bagan 3

Partisipasi Masyarakat Pada Saat dilaksanakan pilkada

Sumber: Data Primer

Dari bagan 3 dapat dilihat bahwa ada perbedaan partisipasi masyarakat sebelum dilaksanakannya pilkada tahun 2015 antara sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), sekolah menengah (SMA/Sederajat), dan sekolah menengah ke atas (PT). SMP ke Bawah dengan hasil persentase 79% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya tinggi, SMA/Sederajat dengan hasil persentase 77% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya tinggi, dan Perguruan Tinggi dengan hasil persentase 96% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya sangat tinggi.

Partisipasi Masyarakat Sesudah dilaksanakannya Pilkada.

Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang sesuai dengan sub variabel partisipasi Masyarakat Sebelum dilaksanakannya Pilkada antara tingkat sekolah

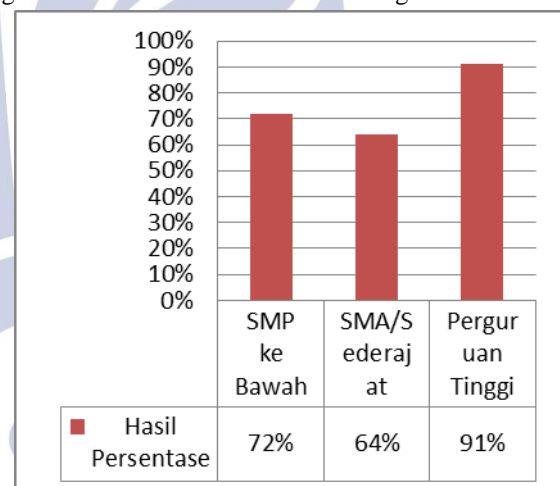
menengah ke bawah (SMP ke bawah), menengah (SMA/ sederajat), dan menengah ke atas (Perguruan Tinggi) adalah.

Tabel 17
Perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Sesudah dilaksanakan Pilkada

Pendidikan	Skor	Persentase
SMP ke Bawah	148	72%
SMA / Sederajat	70	64%
Perguruan Tinggi	50	91%

Sumber: Data Primer

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMP ke Bawah dengan Sampel 205 responden diperoleh hasil rata-rata Skor sebesar 148 dengan hasil persentase 72%. Tingkat partisipasi masyarakat lulusan SMA / Sederajat dengan Sampel 110 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 70 dengan hasil persentase 64%. Dan Tingkat partisipasi masyarakat lulusan Perguruan Tinggi dengan Sampel 55 responden diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 40 dengan hasil persentase 91%. Apabila digambarkan dalam colum adalah sebagai berikut.



Bagan 4

Tingkat Partisipasi Masyarakat Sesudah dilaksanakan Pilkada

Sumber: Data Primer

Dari bagan 4 dapat dilihat bahwa ada perbedaan partisipasi masyarakat sebelum dilaksanakannya pilkada tahun 2015 antara sekolah menengah ke bawah (SMP ke bawah), sekolah menengah (SMA/Sederajat), dan sekolah menengah ke atas (PT). SMP ke Bawah dengan hasil persentase 72% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya tinggi, SMA/Sederajat dengan hasil persentase 62% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya tinggi, dan Perguruan Tinggi dengan hasil persentase 91% sehingga dikategorikan tingkat partisipasinya sangat tinggi.

Uji Tiga atau Lebih Sampel Yang Tidak Berhubungan (Uji Kruskal Wallis)

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data statistik inferensial non-parametris dengan rumus analisis data dengan uji tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan (Uji Kruskal Wallis) yang dihitung menggunakan SPSS 16.0 yang hasilnya adalah sebagai berikut.

Kruskal-Wallis			
Ranks			
	pendidikan	N	Mean Rank
partisipasi masyarakat	bawah	205	135.96
	menengah	110	203.91
	atas	55	333.34
	Total	370	

Test Statistics ^{a, b}	
	partisipasi masyarakat
Chi-Square	153.988
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: pendidikan

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis data dengan uji tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan (Kruskal Wallis) antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota blitar signifikansinya adalah 0,000. Kemudian dikonsultasikan dengantaraf kesalahan (0,5) untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis. Ketentuannya adalah jika Signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan jika Signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, dengan demikian koefisiensi dari hasil data adalah 0,000 $\leq 0,05$ itu signifikansi maka H_0 ditolak sehingga H_a diterima. Hasilnya menunjukkan terjadi hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam Pilkada tahun 2015.

Berdasarkan hasil perolehan data yang ada, diperoleh hasil bahwa data masyarakat yang memiliki kelulusan sekolah menengah ke bawah (SMP ke Bawah), sekolah menengah (SMA/Sederajat), dan sekolah menengah ke atas (Perguruan Tinggi) yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan ada perbedaan tingkat partisipasi antara sekolah menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas dengan kategori penilaian yang terdiri atas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kriteria tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat kelulusan dalam pendidikan. Dalam penelitian ini terdapat tiga sub variabel penelitian, yaitu tingkat partisipasi masyarakat sebelum dilaksanakan pilkada, pada saat dilaksanakan pilkada, dan sesudah dilaksanakan pilkada.

Konsep M.L. Goel berasumsi bahwa partisipasi politik masyarakat dapat ditinjau dari partisipasi politik individual, kemudian dari konsep tersebut, partisipasi

politik dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe partisipasi politik menurut konsep Paige yaitu:

Partisipasi politik masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa tipe antara lain aktif, apatis, militant radikal dan pasif. Tipe-tipe partisipasi politik masyarakat dapat diukur dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu seperti, *Apathetic anactives*, *Passive supporters*, *Contact specialist*, *Communicators*, *Party and campaign workers*, *Community activists*, *Protesters*. Jika individu-individu melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai partisipatif, maka partisipasi politik masyarakat dikategorikan sebagai partisipasi aktif, dan jika kegiatan yang dilakukan individu lebih kearah negatif atau tidak peduli terhadap politik, maka partisipasi masyarakat tergolong apatis. Partisipasi masyarakat akan menjadi militant radikal jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah diwarnai dengan tindak kekerasan, sedangkan partisipasi akan berubah menjadi pasif, jika tindakan-tindakan individu tidak didasari oleh pengetahuan dan hanya terbatas pada kegiatan menaati aturan-aturan pemerintah.

Berarti dalam partisipasi agar mendapatkan tingkat partisipasi yang tinggi, memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang luas salah satunya adalah melalui pendidikan, dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan banyak pengetahuan sehingga partisipasi politik masyarakat akan berubah menjadi aktif.

Dari hasil perolehan data tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan SMP ke Bawah sesuai dengan sub variabel yang pertama yaitu sebelum dilaksanakan pilkada partisipasinya rendah yang hanya mencapai 35% atau tidak berperan sebelum dilaksanakan pilkada. Namun dalam sub variabel yang ke dua pada saat dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya meningkat menjadi tinggi mencapai 79% atau dalam sub variabel ini masyarakat ikut berperan dalam pilkada, dan dalam sub variabel yang ke tiga sesudah dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya juga tinggi namun hasil prosentasenya menurun menjadi 72%, namun dalam sub variabel ini masyarakat masih ikut berperan dalam pilkada.

Tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan SMA/Sederajat sesuai dengan sub variabel yang pertama yaitu sebelum dilaksanakan pilkada partisipasinya sedang yang mencapai 60% atau cukup berperan sebelum dilaksanakannya pilkada. Dalam sub variabel yang kedua pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya naik menjadi tinggi mencapai 77% atau berperan pada saat dilaksanakannya pilkada. Sedangkan dalam sub variabel yang ketiga yaitu sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya tinggi namun hasil prosentasenya

menurun menjadi 64% tetapi masyarakat masih ikut berperan sesudah dilaksanakannya pilkada.

Tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki lulusan Perguruan Tinggi sesuai dengan sub variabel yang pertama yaitu sebelum dilaksanakan pilkada partisipasinya tinggi yang mencapai 75% atau berperan sebelum dilaksanakannya pilkada. Dalam sub variabel yang kedua pada saat dilaksanakannya pilkada tingkat partisipasinya naik menjadi sangat tinggi mencapai 96% atau sangat berperan pada saat dilaksanakannya pilkada. Sedangkan dalam sub variabel yang ketiga yaitu sesudah dilaksanakan pilkada tingkat partisipasinya sangat tinggi namun hasil prosentasenya menurun menjadi 91% tetapi masyarakat masih sangat berperan sesudah dilaksanakannya pilkada.

Hasil analisis data per sub variabel antara tingkat pendidikan SMP ke bawah, SMA / Sederajat dan Perguruan Tinggi, menunjukkan bahwa pada sub variabel yang pertama menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga tingkat partisipasinya. Pada sub variabel yang ke dua menunjukkan bahwa pendidikan SMP ke bawah pada saat dilaksanakannya pilkada lebih berperan daripada masyarakat berpendidikan SMA/Sederajat, dan Perguruan tinggi sangat berperan daripada SMP ke bawah dan SMA/Sederajat pada saat dilaksanakannya pilkada. Sedangkan pada sub variabel yang ketiga yaitu sesudah dilaksanakannya pilkada, masyarakat yang memiliki lulusan SMP ke bawah juga lebih berperan daripada masyarakat yang memiliki lulusan SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi masih sangat berperan dalam kegiatan sesudah pilkada tersebut. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang berpendidikan SMP ke bawah dilihat dari per sub variabel lebih Tinggi daripada SMA/Sederajat, namun Perguruan Tinggi tingkat kesadarannya dalam pilkada sangat tinggi.

Berdasarkan hasil perolehan data per sub variabel, kesadaran masyarakat yang berpendidikan SMP ke Bawah tingkat partisipasinya lebih tinggi daripada SMA/Sederajat, ini dikarenakan adanya money politik dengan mudah dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara salah satu masyarakat yang lulus SMP ke Bawah dengan pertanyaan: Apakah anda pernah mendapatkan uang dari tim sukses dari salah satu calon atau kedua calon tersebut? Jika anda menerima uang, apakah anda tetap berpegang teguh dengan keyakinan anda sendiri atau sebaliknya anda akan memilih calon yang memberi uang tersebut! Jawabannya adalah "Pernah. Kalau dikasih uang, saya akan memilih yang ngasih uang itu". Berarti masyarakat yang memiliki lulusan SMP ke Bawah masih mudah dipengaruhi dengan adanya money politic tersebut dan bukan karena

kesadaran dari dirinya sendiri. Namun tidak semua masyarakat yang lulusan SMP ke Bawah mudah terpengaruh dengan hal tersebut dan banyak yang berpegang teguh dengan pilihannya sendiri.

Sedangkan hasil temuan lain, data tingkat partisipasi masyarakat secara individu berdasarkan skor penilaian antara tingkat sekolah menengah ke bawah (SMP ke Bawah), menengah (SMA/Sederajat), dan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa SMP ke bawah dengan jumlah sampel 205 responden dengan perolehan 3 responden mendapatkan kategori rendah dengan perolehan persentase 1%, 105 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 52%, 92 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 45%, dan 5 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 2%. SMA/Sederajat dengan sampel berjumlah 110 responden dengan perolehan 33 responden mendapatkan kategori sedang dengan hasil persentase 30%, 70 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 64%, dan 7 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 6%. Sedangkan Perguruan Tinggi dengan sampel berjumlah 55 responden dengan diperoleh 19 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil persentase 35%, dan 36 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 65%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil temuan data tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015 yang dihitung dengan rumus Kruskal Wallis diperoleh signifikansi sebesar 0,00 antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota blitar dalam pilkada tahun 2015 dengan taraf kesalahan 0,05. Apabila signifikansi lebih besar dari (\geq) 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan apabila signifikansi kurang dari (\leq) 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil temuan data diperoleh signifikansi $0,00 \leq 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Adanya hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dibuktikan dengan hasil perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan skor tiap individu dilihat dari jenjang pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 pada hal 79.

Hasil temuan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka pengetahuan serta wawasannya terhadap suatu gejala politik semakin luas, sehingga respon atas pemahaman terhadap gejala politik tersebut semakin aktif, sehingga

semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data perhitungan Kruskal Wallis diperoleh signifikansi sebesar 0,00 dengan taraf kesalahan 0,05, dimana $0,00 \leq 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dalam pilkada tahun 2015. Adanya hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Blitar dibuktikan dengan hasil perolehan pada jenjang pendidikan SMP ke bawah dengan jumlah sampel 205 responden diperoleh 3 responden mendapatkan kategori Rendah dengan perolehan prosentase 1% dan 5 responden mendapat kategori Sangat Tinggi dengan hasil prosentase 2%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/Sederajat dengan sampel 110 responden diperoleh 33 responden mendapatkan kategori Sedang dengan hasil prosentase 30% dan 7 responden mendapat kategori Sangat Tinggi dengan hasil prosentase 6%, pada jenjang SMA/Sederajat tidak ada yang mendapatkan kategori Rendah berarti yang terendah adalah kategori Sedang. Sedangkan Perguruan Tinggi dengan sampel berjumlah 55 responden diperoleh 19 responden mendapat kategori tinggi dengan hasil prosentase 35% dan 36 responden mendapat kategori sangat tinggi dengan hasil prosentase 65%, pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi tidak ada yang mendapatkan kategori Rendah dan Sedang berarti yang terendah dalam jenjang ini adalah kategori tinggi. Hasil tersebut membuktikan semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka pengetahuan serta wawasannya terhadap suatu gejala politik semakin luas, sehingga respon atas pemahaman terhadap gejala politik tersebut semakin aktif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat partisipasinya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan pada masyarakat agar meningkatkan pendidikannya baik itu secara formal, informal, maupun nonformal, karena seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang luas salah satunya adalah melalui pendidikan, dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan banyak pengetahuan sehingga partisipasi politik masyarakat akan berubah menjadi aktif. Saran kedua dalam penelitian ini dapat disarankan pada pemerintah setempat maupun penyelenggara pemilihan umum hendaknya agar lebih di tingkatkan pendidikan politik pada masyarakat agar mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya

sebagai warga Negara Indonesia. Dengan demikian, adanya pendidikan politik baik di sekolah maupun di masyarakat nantinya bisa menjadi pemilih yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudjana, H. D. 2004. *Pendidikan Nonformal*. Bandung. Falah Production.
- Sudjana. 2005. *Statistika Metoda*, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bnadung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Sujarweni, wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Roesminingsih, Susarno Lamijan H. 2015. *Teori dan Praktik Pendidikan*. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Purwanto, ngalim. 1998. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Tim Dosen PIP IKIP Malang. 1988. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rafael R M. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Suwarno Wiji. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta. AR-RUZZ MEDIA
- Mistar. 2014. *Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 DPRD Sampang* (studi kasus di Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang). Universitas Negeri Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan.
- <http://kpu.blitarkota.go.id/berita-sosialisasi-bersama-warga-di-taman-kota-kebonrojo-blitar.html>. Diakses tanggal 5 Februari 2016.
- <http://www.bappeda.blitarkota.go.id/pdf.php?id=20>. Diakses tanggal 5 Februari 2016
- http://www.lpmppsulsel.net/v2/attachments/195_PARADI%20GMA%20MATERI%20PENDIDIKAN%20PANCASILA%20DAN%20KEWARGANEGARAAN.pdf. diakses tgl 31 Maret 2016

Undang-Undang No. 34. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dinas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Dinas badan statistik Kota Blitar

